

Total Banten

••• bicara data, bicara fakta

RTRW Kabupaten Serang

TPP ASN Tangsel Disorot

APBD 8,62 TRILIUN JALAN 'MAUT' DIBIARKAN

Dalam 13 hari, empat orang meninggal akibat kecelakaan di Jalan Pasar Kemis-Rajeg yang rusak parah dengan lubang sedalam 10–25 sentimeter. Jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Warga mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran, mengingat daerah ini memiliki kapasitas fiskal kuat dengan PAD lebih dari Rp5 triliun.



35 HALAMAN

HARGA
Rp 40.000,-



RTRW Kab Serang Direvisi Bisakah Keseimbangan Ekonomi dan Ekologi Dijaga?

TOTAL BANTEN - Rencana Pemerintah Kabupaten Serang merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memunculkan perdebatan. Di satu sisi, langkah ini dinilai sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan nasional. Namun di sisi lain, kekhawatiran terhadap dampak ekologis mengemuka, terutama di wilayah yang kerap dilanda banjir.

Revisi RTRW tersebut masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Serang Tahun 2025. Pemerintah daerah beralasan, perubahan diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, termasuk sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).

Akademisi Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai revisi RTRW perlu dikaji secara hati-hati. Ia mengingatkan bahwa perubahan tata ruang kerap berkorelasi dengan meningkatnya risiko bencana, terutama jika mengabaikan fungsi ekologis wilayah.

"Jika berkaca pada sejumlah daerah, perubahan tata ruang sering menjadi salah satu faktor pemicu bencana. Karena itu, aspek daya dukung lingkungan harus menjadi pertimbangan utama," ujar Adib, Rabu (8/4/2026).

Menurut dia, ketersediaan kawasan resapan air menjadi faktor penting yang tidak boleh terabaikan. Pengalaman di daerah lain menunjukkan bahwa berkurangnya kawasan resapan dapat berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Serang mulai menyusun dokumen revisi RTRW pada 2026. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, Fardianto, mengatakan penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari hasil peninjauan kembali RTRW pada 2025. "Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga diperlukan penyesuaian," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Revisi RTRW juga mengacu pada ketentuan evaluasi lima tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Selain itu, rekomendasi revisi total telah disampaikan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada akhir 2025.

Di sisi lain, revisi RTRW juga berkaitan dengan kebutuhan investasi. Sejumlah investor menghadapi kendala karena lahan yang telah dibeli masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kabupaten Serang sendiri diwajibkan mempertahankan sekitar 37 ribu hektare LSD dari total 48 ribu hektare lahan baku sawah.

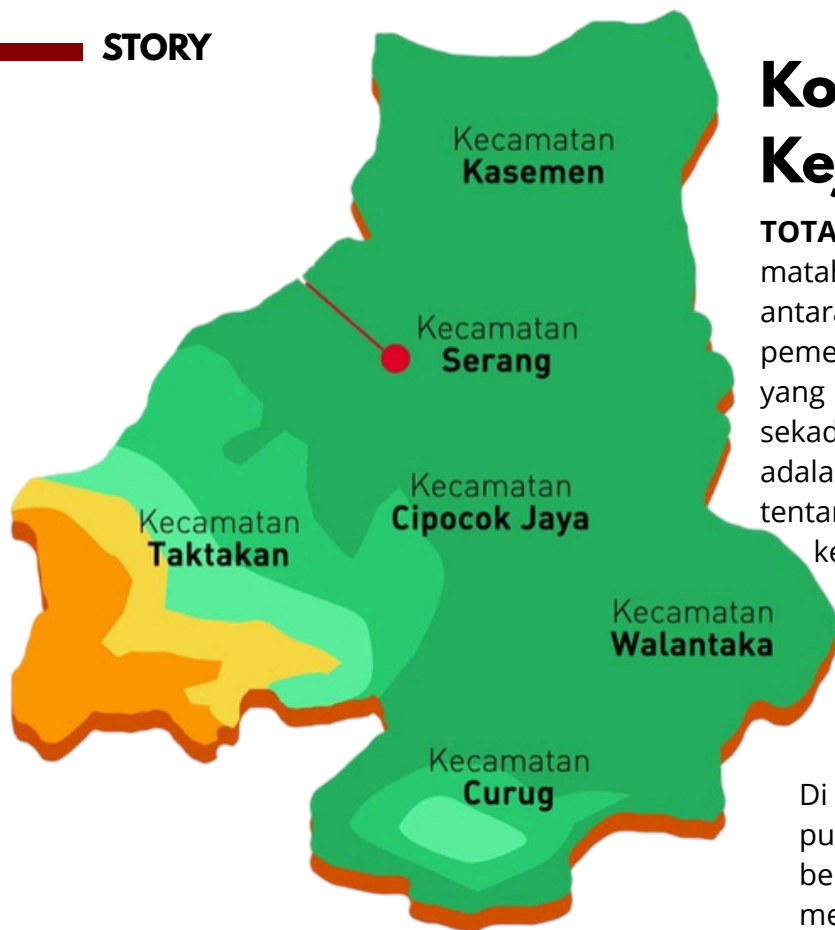
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menyatakan perubahan tata ruang dimungkinkan sepanjang tidak mengurangi total luas lahan sawah yang dilindungi. "Pergeseran dimungkinkan, tetapi jumlah keseluruhan tidak boleh berkurang," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurut dia, jika terjadi alih fungsi lahan, harus disertai dengan penyediaan lahan pengganti agar keseimbangan tetap terjaga. DPRD melalui panitia khusus akan memastikan ketentuan tersebut tercantum dalam dokumen RTRW yang baru.

Kabupaten Serang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penyangga sektor pertanian. Karena itu, kebijakan tata ruang diharapkan tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi lahan dan daya dukung lingkungan.

Perdebatan mengenai revisi RTRW ini mencerminkan tantangan dalam merumuskan kebijakan ruang yang seimbang. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan dan investasi terus meningkat. Di sisi lain, risiko lingkungan menuntut kehati-hatian dalam setiap perubahan kebijakan.

(Eks)



Bayangkan Pelabuhan Banten lama berabad-abad lalu—hiruk-pikuk pedagang dari Arab, Tiongkok, India, hingga Eropa memenuhi dermaga. Serang adalah pusat dunia pada masanya.

Sisa-sisa kemegahan itu kini masih bisa kita raba melalui dinding-dinding Keraton Surosowan. Meski kini hanya berupa reruntuhan, ia tetap memancarkan wibawa sebagai pusat pemerintahan para sultan. Tak jauh dari sana, menara Masjid Agung Banten yang ikonik tetap berdiri tegak, menjadi mercusuar spiritual yang tak lekang dimakan zaman.

Badai Kolonial dan Puing-Puing Perlawanan Namun, sejarah tak selalu tentang kejayaan. Kota Serang pernah mengalami masa-masa kelam saat ambisi kolonial Belanda mulai membelenggu jalur perdagangan Nusantara. Pada tahun 1682, cengkeraman Belanda mulai meruntuhkan kedaulatan Banten.

Keraton Surosowan yang megah dihancurkan, dan peran Serang sebagai pusat kekuasaan mulai digeser demi kepentingan penjajah. Meski aset dirampas dan bangunan dihancurkan, semangat "Aje Kendor" masyarakatnya tidak pernah padam. Jejak perlawanan ini tertanam dalam ingatan kolektif warga, menjadikan Serang sebagai kota dengan karakter yang keras namun berpendirian kuat.

Kota Serang: Memoar Kejayaan di Tanah Sultan

TOTAL BANTEN - Ada aroma khas yang tertinggal saat matahari mulai terbenam di ufuk barat Kota Serang. Di antara deru mesin kendaraan dan gedung-gedung pemerintahan yang menjulang, terselip bisikan sejarah yang tak pernah benar-benar hilang. Kota ini bukan sekadar ibu kota administrasi bagi Provinsi Banten; ia adalah sebuah saksi bisu, sebuah memoar raksasa tentang kejayaan, perlawanan, hingga kebangkitan kembali.

Langkah kaki di Kota Serang seolah membawa kita kembali ke abad ke-16. Di masa itu, Serang bukanlah sekadar titik di peta, melainkan jantung dari kekuasaan maritim yang disegani dunia: Kesultanan Banten.

Di bawah komando Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, kota ini bertransformasi menjadi metropolitan kuno yang megah --

Persalinan Kota di Jantung Banten: Hikayat Lahirnya Kota Serang

Sejarah tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia bermula dari sebuah kegelisahan, lalu tumbuh menjadi aspirasi, dan akhirnya bermuara pada sebuah perubahan besar. Begitulah potret lahirnya Kota Serang, sebuah wilayah yang kini berdiri tegak sebagai ibu kota Provinsi Banten, namun dulunya merupakan bagian tak terpisahkan dari Kabupaten Serang.

Pada medio 2005, Kabupaten Serang adalah sebuah wilayah raksasa. Dengan luas mencapai 1.704,12 km dan populasi yang membengkak hingga lebih dari 11 juta jiwa (data tahun 2005), pelayanan publik mulai terasa sesak. Rakyat merindukan birokrasi yang lebih dekat, pembangunan yang lebih gesit, dan kesejahteraan yang lebih merata.

Tahun 2004 hingga 2007 menjadi masa-masa yang krusial. Lembaran-lembaran keputusan Dewan mengalir bagai air. Ada Keputusan DPRD Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjadi "lampu hijau" pertama bagi pembentukan kota otonom ini. Disusul kemudian dengan komitmen dana hibah APBD selama tiga tahun berturut-turut untuk memastikan kota baru ini tidak "lahir dalam kelaparan".



Maraton Regulasi: Menjemput Otonomi

Tahun 2004 hingga 2007 menjadi masa-masa yang krusial. Lembaran-lembaran keputusan Dewan mengalir bagai air. Ada Keputusan DPRD Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjadi "lampu hijau" pertama bagi pembentukan kota otonom ini. Disusul kemudian dengan komitmen dana hibah APBD selama tiga tahun berturut-turut untuk memastikan kota baru ini tidak "lahir dalam kelaparan".

Puncaknya terjadi di tahun 2007. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang resmi memisahkan diri. Wilayah seluas 266,71 km yang mencakup enam kecamatan strategis—Serang, Kasemen, Taktakan, Cipocok Jaya, Curug, dan Walantaka—resmi memiliki identitas barunya sendiri.

Namun, sebuah kota baru tidak bisa langsung berjalan sendiri. Dari 2007 hingga 2008, sosok Asmudji hadir sebagai Pejabat (Pj) Wali Kota pertama. Tugasnya berat: ia harus membangun pondasi dari nol. Mulai dari merancang struktur pemerintahan, memfasilitasi pembentukan DPRD Kota Serang, hingga menyiapkan pesta demokrasi perdana bagi warga kota.

Dalam segala keterbatasan fisik dan fasilitas kala itu, sejarah mencatat bahwa masa transisi ini berhasil dilalui tanpa hambatan berarti. Pondasi birokrasi mulai tertata, meski wajah ibu kota baru ini kala itu belum segemerlap namanya.

Kini, Serang berkembang menjadi pusat pendidikan dan ekonomi. Namun, uniknya, modernitas tidak menelan jati diri mereka. Di sudut-sudut kota, tradisi seperti Ngaseuk Pare atau perayaan Maulid Nabi yang kolosal tetap hidup sebagai pengingat bahwa mereka adalah ahli waris para Sultan.

Berkunjung ke Serang hari ini adalah tentang merayakan harmoni. Anda bisa melihat kemajemukan di Vihara Avalokitesvara yang bersejarah, lalu bergeser ke Benteng Speelwijk untuk melihat sisa pertahanan masa lalu.

Setelah lelah berkeliling sejarah, lidah Anda akan dimanjakan dengan cita rasa otentik yang melegenda. Aroma Sate Bandeng yang dibakar dengan bumbu rempah melimpah atau pedas-segar-nya Pecak Bandeng menjadi bukti bahwa kekayaan Serang tidak hanya ada di buku sejarah, tapi juga di atas piring. **(Red)**

Kota Serang adalah cerminan perjalanan panjang yang penuh liku. Ia pernah berjaya, pernah terjatuh, namun selalu tahu cara untuk bangkit. Bagi siapa pun yang merindukan perpaduan antara spiritualitas masa lalu dan ambisi masa depan, Serang adalah tempat di mana setiap sudut jalanan punya cerita, dan setiap reruntuhan batu punya nyawa. Sejarah Serang adalah sejarah tentang harga diri yang terus dijaga hingga hari ini. **Majalah Total Banten**

Menyesap Filosofi di Balik Sepiring Riwayat Kuliner Serang

TOTAL BANTEN - Perjalanan ke suatu daerah barulah lengkap jika lidah turut mencecap kisah yang tersaji di atas piring. Di Kota Serang, Banten, setiap suapan bukan sekadar perkara mengenyangkan perut, melainkan upaya menelusuri kembali jejak sejarah Kesultanan Banten hingga akulturasi budaya yang telah berlangsung berabad-abad.

Dari meja makan para bangsawan di keraton hingga dapur sederhana warga di pinggiran sawah, kuliner Serang menyimpan riwayat yang panjang. Berikut adalah narasi rasa yang lahir dari tanah jawara:



Sate Bandeng; Kuliner Bangsawan Tanpa Duri

Sate bandeng bukan sekadar olahan ikan. Ia adalah simbol kecerdasan dapur keraton Banten pada abad ke-16. Konon, Sultan Banten saat itu sangat menggemari ikan bandeng, namun terganggu oleh banyaknya duri halus (mencapai 214 duri).

Sang juru masak pun memutar otak; ia mengeluarkan daging tanpa merusak kulit, membuang durinya, menghaluskannya dengan santan dan rempah, lalu memasukkannya kembali ke dalam kulit ikan. Teknik ini menciptakan santapan mewah yang bisa dinikmati tanpa rasa khawatir.

Rabeg; Kenangan Sultan akan Kota Rabigh

Rabeg adalah bentuk cinta Sultan Maulana Hasanuddin terhadap perjalanannya ke Tanah Suci. Terinspirasi dari kota pelabuhan Rabigh di Laut Merah, Sultan meminta juru masaknya mengolah daging kambing dengan bumbu rempah yang kuat—jahe, kayu manis, dan lada.



Hasilnya adalah hidangan berkuah hitam kecokelatan yang menawarkan kehangatan Timur Tengah di tanah Jawa, perpaduan sempurna antara rasa gurih, manis, dan pedas. Dilihat dari penampilannya saat disajikan, rabeg yang dikenal sebagai kuliner tradisional khas Banten ini sekilas mirip dengan semur.

Namun, bedanya, kuahnya lebih encer dan lebih kaya rempah. Bahkan, pada bumbunya kerap diberi tambahan cabai utuh.

Saat ini, makanan yang satu ini tak hanya disajikan saat momen spesial seperti Idulfitri dan Iduladha saja, namun bisa ditemui di banyak tempat Kota Serang.



Nasi Bakar Sumsum; Riwayat dari Rumah Potong Hewan

Lahir pada tahun 1941, nasi bakar sumsum adalah bukti kreativitas warga Serang dalam menyiasati keterbatasan. Saat itu, para pekerja di rumah potong hewan melihat tulang-tulang sisa pemotongan dibuang begitu saja.

Mereka pun memungutnya, mengambil sumsum yang tersembunyi di dalam tulang, lalu mencampurkannya ke dalam nasi berbumbu.

Setelah dibungkus daun pisang dan dibakar, aroma harumnya pun melegenda hingga kini sebagai salah satu kuliner yang paling dicari. Nasi bakar ini tak hanya ditemui di Kota Serang, namun di Kota Kota besar seperti Jakarta tersedia juga nasi bakar tersebut.

Ketan Bintul; Penawar Rindu di Bulan Suci

Sejarah mencatat bahwa kudapan ini sudah ada sejak abad ke-16 dan merupakan kegemaran para Sultan Banten. Konon kudapan ini selalu dibawa dan dijadikan persediaan bekal perjalanan dan menu berbuka puasa oleh sang sultan. Sering didapati juga sang sultan membagikan ketan bintul kepada warga dan prajurit yang sedang berbuka puasa.



Sering didapati juga sang sultan membagikan ketan bintul kepada warga dan prajurit yang sedang berbuka puasa. Kudapan ini pun sering dijadikan menu untuk menjamu para bangsawan kerajaan yang berkunjung ke kesultanan.

Kini makanan khas Serang berbahan ketan dan taburan serundeng sejenis kelapa parut yang disangrai dengan rempah-rempah. Bisa pula disajikan dengan gulai kambing atau semur daging.

Ketan bintul dapat dijumpai di pasar-pasar tradisional atau di toko-toko kue. Hidangan ini sering dijumpai sebagai menu pembuka puasa di bulan Ramadan.

Ketan bintul disajikan dengan cara dipotong persegi atau dibentuk bulat-bulat, diberi taburan serundeng, lalu dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang yang digunakan adalah daun pisang yang telah dilayukan dengan cara dibolak-balik di atas air yang mendidih. Setelah daun layu, dibersihkan dari air yang menempel lalu dapat digunakan untuk membungkus.

Ada nilai filosofis tentang kebersamaan dan kesederhanaan di balik setiap potong ketan bintul yang dibagikan.



Gerem Asem; Simfoni Pedas dan Masam

Menggunakan bahan dasar ayam atau bebek, gerem asem adalah tantangan bagi pecinta pedas. Keunikannya terletak pada penggunaan asam jawa dan cabai rawit utuh yang memberikan ledakan rasa di mulut.

Hidangan ini sering kali dianggap sebagai pemacu selera makan di saat siang hari yang menyengat. Makanan ini sering ditemui saat perayaan-perayaan besar maupun di tempat makan tradisional di Kota Serang.

Pasung Merah

Dalam setiap hajatan, mulai dari pernikahan hingga khitanan, kue pasung merah tak pernah absen. Dibungkus daun pisang berbentuk kerucut, kue berbahan tepung beras dan gula merah ini melambangkan harapan agar acara yang diselenggarakan membawa kemanisan dan keberkahan bagi tuan rumah.



Pecak Bandeng; Segar di Tengah Terik

Berbeda dengan sate bandeng yang dihaluskan, pecak bandeng menyajikan tekstur ikan yang utuh. Kekuatannya terletak pada sambal mentah yang menggabungkan cabai, bawang, dan jeruk limau yang langsung disiram di atas ikan bakar. Ini adalah makanan petani dan nelayan Serang yang membutuhkan kesejukan instan di tengah teriknya cuaca Banten.

Denyut Baru di Jantung Kota Jawara: Merajut Warisan, Membangun Masa Depan

TOTAL BANTEN - Lampu panggung di area Tourist Information Center (TIC) Kota Serang itu tak lagi sekadar benda mati yang membiaskan cahaya. Setiap akhir pekan, ia kini menjadi saksi bisu bagi sebuah kebangkitan.

Di bawah sorotnya, bunyi-bunyian tradisional mulai bertalu, dan gerak tari khas tanah jawara kembali menemukan rumahnya. Di sinilah, Serang sedang mencoba menjahit kembali kepingan identitas budaya yang sempat berserakan.



Kota Serang

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Budi Rustandi, Kota Serang tak lagi ingin hanya menjadi kota perlintasan. Melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disparpora), Serang sedang bersolek, memoles wajahnya menjadi 'City of Heritage'. Sebuah ambisi besar untuk menjadikan sejarah bukan hanya sebagai kenangan di buku usang, melainkan mesin penggerak ekonomi masa depan.

Kepala Disparpora Kota Serang, Zeka Bachdi, menyadari betul bahwa pariwisata tanpa konsistensi adalah ruh yang hilang.

"Nanti akan ada pertunjukan seni dan budaya khas Kota Serang setiap Sabtu dan Minggu. Tanpa putus," ujar Zeka saat ditemui di Serang, Minggu (4/1/2026). Baginya, panggung TIC adalah janji kepada wisatawan: bahwa Serang selalu punya alasan untuk dikunjungi kembali, sekaligus menjadi kran baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jauh sebelum riuh klakson kendaraan memenuhi jalanan protokol, Serang memiliki akar yang menghunjam dalam di Banten Girang. Situs ini bukan sekadar tumpukan artefak atau gua bersejarah; ia adalah titik nol identitas. Dalam roadmap pariwisata 2025-2026, Banten Girang diposisikan sebagai destinasi unggulan mendampingi kemegahan Banten Lama.

Pemerintah sadar, membangun pariwisata tak bisa dilakukan dari balik meja kantor saja. Maka, 67 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tingkat kelurahan dibentuk. Mereka adalah ujung tombak, para "penjaga gerbang" yang bertugas menggali potensi tersembunyi di balik gang-gang sempit dan sudut-sudut kota yang terlupakan.

Wajah modern Serang juga mulai tampak dari geliat ekonomi kreatifnya. Kini, 40 pelaku ekonomi kreatif bisa tersenyum lebar. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mereka kini resmi terlindungi oleh Kemenkumham lewat fasilitasi pemerintah.

Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, lima di antaranya telah menunjukkan pertumbuhan yang melesat. Untuk mendukung ini, sebuah ikon baru bernama 'Royal Baru' tengah disiapkan. Kawasan ini diproyeksikan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi, tempat di mana para kreator lokal menjadi aktor utama, bukan sekadar penonton di rumah sendiri.



Peresmian TIC Kota Serang

Ambisi Serang tak berhenti di panggung seni. Di lintasan olahraga, kota ini sedang menyusun strategi untuk keluar dari "bayang-bayang urutan bawah" pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda). Langkah strategis itu dimulai dari penataan Stadion Maulana Yusuf.

Memulangkan Marwah di Tanah Jawara: Transformasi Stadion Maulana Yusuf



Stadion Maulana Yusuf

Selama bertahun-tahun, deru napas para atlet di lintasan lari kerap tenggelam dalam riuh rendah aktivitas niaga yang tak beraturan. Namun kini, angin perubahan mulai berembus. Pengembalian fungsi gelanggang ini bukan sekadar urusan semen, aspal, atau pagar beton—ia adalah sebuah ikhtiar besar memulangkan jati diri ruang publik demi melahirkan generasi emas dari tanah para jawara.

Sepuluh bulan terakhir menjadi saksi bisu transformasi tersebut. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disparpora) Kota Serang mulai menerjemahkan visi Wali Kota Budi Rustandi dengan sebuah keberanian: melakukan 'pemurnian' fungsi stadion.

Fokusnya tunggal, menjadikan kawasan ini kembali sebagai kawah candradimuka bagi pemuda, bukan sekadar pasar tumpah. "Kami ingin atlet memiliki ruang latihan yang layak. Sebelumnya, kawasan ini sudah menjadi semi-pusat perdagangan. Kini, kami kembalikan sebagai sarana prasarana olahraga murni," ujar Kepala Disparpora Kota Serang, Zeka Bachdi.

Langkah 'sterilisasi' ini lahir dari sebuah urgensi prestasi. Kota Serang tak lagi bisa dipandang sebelah mata di peta olahraga nasional maupun global. Nama-nama atlet muda kita mulai menghiasi papan skor dunia—mulai dari ketangguhan karateka di arena Popnas, hingga torehan tinta emas lifter Rizki Juniansyah yang menggetarkan panggung Olimpiade.

Namun bagi Zeka, infrastruktur hanyalah wadah fisik. Roh dari penataan ini adalah manusia yang tumbuh di dalamnya. Target besar pun telah dipancang: menembus posisi tiga besar dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) 2026. Melalui Program Pelatihan Pelajar Daerah (PPLP), talenta lokal digembleng agar tak lagi menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.

Keringat Atlet dan Asap Kuliner

Pemerintah Kota Serang menyadari bahwa penataan tak boleh mengabaikan urusan perut. Dengan alokasi APBD 2025 sebesar Rp 2,3 miliar, pendekatan yang diambil bukanlah penggusuran paksa, melainkan penataan yang memasyarakat.

Deretan awning yang rapi dibangun untuk para pedagang kuliner, sementara kantong parkir ditata agar tak lagi menciptakan benang kusut lalu lintas. Stadion Maulana Yusuf kini dirancang menjadi sebuah ekosistem yang harmonis. Sebuah tempat di mana atlet bisa memeras keringat dengan fokus, sementara ekonomi kerakyatan tetap berdenyut dalam keteraturan yang estetik.

Visi besar ini rupanya melompat keluar dari pagar stadion. Di balik pembinaan fisik, ada investasi otak dan keterampilan yang masif. Sepanjang tahun ini, sebanyak 350 pemuda telah dididik menjadi tenaga terampil yang siap bertarung di rimba digital.

"Kami mendidik mereka menjadi pemuda yang berkarya. Ada yang mendalami bidang content creator, jurnalistik, hingga sertifikasi pelopor bencana alam," tutur Zeka.

Hasilnya bukan sekadar isapan jempol. Salah satu pemuda binaan Kota Serang baru-baru ini berhasil menyabet gelar juara sebagai Pemuda Pelopor di tingkat nasional. Ini menjadi bukti sahih bahwa transformasi yang digagas bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan langkah nyata menjemput masa depan yang lebih bermartabat.



Kota Serang Menuju Arah Baru: Dari Lumbung Pangan ke Magnet Industri dan Pencakar Langit

TOTAL BANTEN - Kota Serang sedang menulis babak baru dalam perjalanan sejarah ekonominya. Tak lagi sekadar dikenal sebagai kota administratif dan pusat pemerintahan Provinsi Banten, kini Serang perlahan bertransformasi menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru—menggabungkan kekuatan industri manufaktur, pembangunan vertikal, dan potensi pariwisata berbasis budaya.

Langkah perubahan itu bukan sekadar wacana. Masuknya investasi asing senilai Rp 650 miliar di wilayah utara kota, dibarengi kebijakan pelonggaran pembangunan gedung bertingkat hingga 30 lantai, menjadi sinyal kuat bahwa Serang tengah membuka diri terhadap arus modal berskala besar.

Sepanjang semester pertama 2025, denyut ekonomi Kota Madani menunjukkan tren yang menjanjikan. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi investasi mencapai Rp 607,09 miliar, atau sekitar 68,44 persen dari target tahunan sebesar Rp 887,06 miliar. Angka ini menempatkan Serang pada jalur optimistis untuk mengejar target akhir tahun.

Meski sempat mengalami perlambatan pada Triwulan III dengan realisasi Rp 101,16 miliar—setelah sebelumnya mencapai puncak Rp 287,65 miliar pada Triwulan II—pemerintah kota melihat fase ini sebagai momentum konsolidasi, bukan kemunduran. Komitmen investasi besar yang telah mengantongi perizinan diyakini akan menjadi penopang untuk menutup sisa target sebesar Rp 279,9 miliar.

Sorotan utama kini mengarah ke Kecamatan Kasemen, khususnya Kelurahan Sawah Luhur. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung ketahanan pangan dengan luas lahan basah mencapai 7.418,6 hektar tersebut bersiap menyambut wajah ekonomi baru, yaitu industri manufaktur. Transformasi ini bukan tanpa dasar hukum. Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020–2040, Sawah Luhur memang ditetapkan sebagai kawasan industri.

Kepastian itu diperkuat dengan terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari pemerintah pusat kepada PT Jaya Dynasty Indonesia (JDI), perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Tiongkok.

Perusahaan tersebut berencana menanamkan modal Rp 650 miliar untuk membangun kawasan industri seluas 150 hektar, sebuah investasi yang berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja dan mendorong efek berganda bagi perekonomian lokal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, Iwan Sunardi, menegaskan bahwa pengembangan ini sepenuhnya sejalan dengan tata ruang. “PKKPR sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan kami menerima tembusannya. Dalam Perda RTRW, Sawah Luhur memang diperuntukkan sebagai kawasan industri, jadi tidak ada pelanggaran,” ujarnya.

Ramah Investasi, Jaga Kedaulatan Pangan!

Di tengah geliat tersebut, DPMPTSP Kota Serang menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan pasti secara hukum. Kehadiran investasi tidak hanya dilihat dari nilai modal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Ilustrasi Industri

Pemerintah daerah pun menekankan pentingnya keseimbangan. Dengan rata-rata produksi padi 5,05 ton per hektar dan total produksi tahunan mencapai 374.652 ton, integrasi antara industri dan pertanian melalui hilirisasi, resi gudang, hingga penggilingan padi terpadu diproyeksikan menjadi jalan tengah agar kedaulatan pangan tetap terjaga.

Di pusat kota, transformasi Serang bergerak ke arah vertikal. Revisi Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung menghapus batas maksimal 10 lantai, membuka peluang pembangunan gedung hingga 30 lantai. Kebijakan ini menjadi penanda kesiapan Serang memasuki era hunian dan perkantoran modern.

Koridor strategis seperti Jalan Syekh Moh. Nawawi Al-Bantani dan Jalan Mayor Syafei diprediksi akan mengalami perubahan lanskap signifikan. Dengan potensi lahan perdagangan seluas 3.913 hektar, Kota Serang mulai memosisikan diri sebagai alternatif baru bagi pengembangan properti di luar kawasan penyangga utama Jakarta.

Pemerintah kota menyadari bahwa pertumbuhan vertikal harus diiringi kesiapan infrastruktur. Pelebaran jalan kota dari rata-rata 8 meter menjadi 15 meter telah masuk dalam perencanaan, guna mengantisipasi peningkatan mobilitas dan beban lalu lintas di masa depan. Di tengah geliat tersebut, DPMPTSP Kota Serang menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan pasti secara hukum. Kepala DPMPTSP Kota Serang, Arif Rahman, menekankan bahwa pemerintah daerah membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor, baik dalam maupun luar negeri.

“Kami pada prinsipnya sangat terbuka terhadap investasi yang masuk ke Kota Serang. Selama memenuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami akan mempermudah proses perizinannya,” tegas Arif Rahman.

Ia menambahkan, kehadiran investasi tidak hanya dilihat dari nilai modal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di luar industri dan properti, sektor pariwisata tetap menjadi 'raksasa tidur' dengan potensi investasi hingga Rp 55 triliun, terutama di kawasan pesisir dan situs bersejarah Banten Lama. Rencana pembangunan resort, taman rekreasi, hingga rest area berbasis syariah diproyeksikan menjadi penyeimbang arus modal industri.

Tantangan ke depan adalah pengendalian harga lahan. Saat ini, harga tanah di Kota Serang berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per meter persegi, bahkan mencapai Rp 2,5 juta di kawasan tertentu. Pemerintah dituntut menjaga agar spekulasi lahan tidak menghambat investor strategis. **(Red)**

Di Balik TPP ASN Tangsel: Dugaan Pengaturan dan Risiko Kerugian Daerah

TOTAL BANTEN - Polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluas. Persoalan yang semula berpusat pada besaran tunjangan, kini berkembang menjadi isu tata kelola—menyangkut dugaan celah regulasi, potensi penerimaan ganda, hingga temuan audit negara.

Sorotan mengarah pada Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.10.3/Kep.542-Huk/2025 tentang penetapan TPP ASN. Dalam beleid tersebut, diatur pemberian TPP bagi jabatan fungsional melalui skema penyetaraan dan kategori jabatan fungsional lainnya. Dua nomenklatur ini dinilai membuka ruang interpretasi yang berpotensi tumpang tindih.

Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar, menilai persoalan ini bukan semata administratif. Ia melihat adanya indikasi kelemahan dalam perumusan kebijakan yang dapat berujung pada persoalan hukum.

“Jika berbicara mengenai dugaan perbuatan melawan hukum, problem utamanya terletak pada penentuan besaran TPP yang tidak berbasis pada formulasi yang disyaratkan,” ujar Suhendar, Rabu (18/3/2026).

Ia menyoroti kemungkinan adanya ASN yang menerima TPP dari lebih dari satu kategori jabatan. Kondisi ini, menurut dia, mencerminkan tidak solidnya desain kebijakan sejak awal, terutama dalam mengatur relasi antara jabatan hasil penyetaraan dan jabatan fungsional murni.

Dugaan tersebut menemukan konteksnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan itu, tercatat pembayaran TPP sebesar Rp156.607.044 kepada pegawai yang tengah menjalani cuti di luar tanggungan negara. Temuan ini mengindikasikan lemahnya pengendalian internal dalam proses verifikasi dan pencairan anggaran.

Dalam perspektif tata kelola keuangan daerah, kasus tersebut bukan sekadar kesalahan teknis. Ia mencerminkan potensi kegagalan sistemik—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan.

Di tengah sorotan, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyatakan akan melakukan pengecekan. Ia menegaskan bahwa anggaran TPP telah dialokasikan dalam APBD dan diperuntukkan bagi seluruh ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kalau ada informasi penerimaan ganda, nanti akan kami sisir,” ujar Benyamin.

Ia juga membuka kemungkinan adanya kelebihan pembayaran dan menegaskan bahwa dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah apabila terbukti terjadi penerimaan ganda.



Sebelumnya, polemik TPP ini juga dipicu oleh besaran tunjangan yang dinilai tinggi pada sejumlah jabatan. Data yang beredar menunjukkan adanya ASN dengan jabatan tertentu yang menerima TPP hingga Rp56,7 juta per bulan. Angka ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai dasar perhitungan dan asas keadilan dalam distribusi tunjangan.



APBD Bengkak, Jalan “Maut” Dibiarkan?

TOTAL BANTEN - Kerusakan parah di Jalan Raya Pasar Kemis kini tak lagi sekadar persoalan infrastruktur. Dalam 13 hari, empat pengendara sepeda motor tewas di ruas jalan yang dipenuhi lubang dan dilintasi kendaraan berat. Di tengah angka korban yang terus bertambah, pertanyaan publik mengarah pada satu hal: ke mana arah belanja daerah?

Sejak awal Februari 2026, kecelakaan terjadi beruntun. Pada 1 Februari, seorang perempuan berusia 42 tahun tewas setelah terjatuh dan terlindas truk molen di depan kawasan industri. Enam hari kemudian, korban lain meninggal dunia setelah diduga kehilangan kendali akibat jalan rusak dan menabrak dump truk.

Rentetan itu berlanjut pada 11 Februari, ketika seorang pria tewas dalam kecelakaan dengan truk. Puncaknya, 13 Februari pagi, seorang siswi SMA kelas XII yang tengah berangkat sekolah meregang nyawa di lokasi kejadian. Empat korban, satu pola yang berulang: jalan berlubang, kendaraan besar, dan minimnya perlindungan keselamatan.

Pantauan di lapangan menunjukkan lubang menganga hampir di sepanjang ruas jalan, dengan kedalaman mencapai 15 hingga 25 sentimeter. Permukaan jalan tidak rata, memaksa pengendara bermanuver di tengah kepadatan lalu lintas—situasi yang semakin berisiko saat bersinggungan dengan truk bertonase besar.

Padahal, Jalan Raya Pasar Kemis merupakan jalur vital penghubung kawasan industri dengan wilayah Rajeg. Ribuan pekerja, pelajar, dan kendaraan logistik melintas setiap hari di ruas sepanjang 6 hingga 8 kilometer tersebut. Warga mengaku kondisi ini telah lama terjadi. Herni (35) menyebut lubang-lubang di jalan menjadi ancaman harian. “Setiap hari harus ekstra hati-hati, tapi tetap saja kecelakaan terjadi,” ujarnya.

Di tengah kondisi itu, sorotan meluas ke arah kebijakan anggaran. Dalam penyusunan APBD Tahun 2026, Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang memang mengalami penyesuaian dari Rp8,66 triliun menjadi Rp8,17 triliun, atau turun 5,62 persen akibat berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp619,01 miliar.

Data tersebut menunjukkan kapasitas fiskal daerah masih besar. Karena itu, muncul pertanyaan publik mengenai prioritas belanja, khususnya pada sektor infrastruktur dasar yang langsung menyangkut keselamatan warga.

Pemerintah Kabupaten Tangerang merespons situasi ini dengan mengeluarkan surat edaran penghentian sementara operasional truk besar di sejumlah ruas jalan non-tol.

Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan risiko kecelakaan sekaligus mendukung perbaikan jalan.

“Jadi memang 2026 kita perbaiki (jalan) yang memang lokus-lokusnya perlu perbaikan. Nanti 2027-2028 kita prioritaskan anggarannya untuk perbaikan infrastruktur jalan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/2/2026).

Ia menegaskan, penghentian operasional berlaku bagi truk tambang dan kendaraan berat dengan sumbu roda tiga hingga lima atau lebih, terutama yang melintas di ruas jalan rusak.

“Ini adalah undangan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya tanggal 18 Februari 2026 para pengembang di wilayah Pantura juga sudah kita undang. Dan tadi sudah kita sampaikan terkait kondisi dan situasi di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Menurut Maesyal, langkah ini diambil demi keselamatan warga setelah terjadinya empat kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan besar. “Karena gak mungkin kan yang parsial gitu saya stop. Karena itu mengangku kebutuhan sehari-hari masyarakat, dan itu pertumbuhan ekonomi juga kan bagi para pekerja,” katanya.